

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian studi kasus, dalam arti penelitian difokuskan pada satu kasus atau fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Kasus atau fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung atas pengalihfungsian Taman Hutan Kota Way Halim menjadi kawasan ekonomi dan bisnis.

Mengenai tipe penelitian studi kasus, Yin (2002: 1) menyatakan bahwa secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus karena pada penelitian ini terdapat sebuah kasus atau fenomena yang menjadi

objek penelitian yaitu pengalihfungsian THK Way Halim menjadi kawasan bisnis.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian, yaitu dengan melihat variabel dari konsep Wahab tentang kriteria pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif kebijakan untuk melihat apa yang menjadi faktor atau dasar terbentuknya kebijakan berupa RTRW yang mengakibatkan THK Way Halim berubah fungsi:

1. Nilai-nilai Politik

Pembuat keputusan kebijakan mungkin melakukan penilain atas alternatif kebijakan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya, atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik, dan kebijakan akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik, atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan.

2. Nilai-nilai Organisasi

Para pembuat keputusan kebijakan, khususnya birokrat, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di masa ia terlibat atau bekerja di dalamnya. Organisasi, seperti badan-badan administrasi publik (dinas pemerintah), menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Sepanjang nilai-nilai semacam itu ada, orang-orang yang bertindak selaku pengambil keputusan dalam organisasi ini kemungkinan akan diberi pedoman oleh pertimbangan-pertimbangan rasional semacam itu sebagai perwujudan dari hasrat untuk melihat organisasinya tetap lestari, untuk tetap maju atau untuk memperlancar program-program dan kegiatan-kegiatannya, atau untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang selama ini dinikmati.

3. Nilai-nilai Pribadi

Hasrat untuk melindungi, memenuhi kesejahteraan, kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, reputasi diri, dan posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan.

4. Nilai-nilai Kebijakan

Adapun para pembuat kebijakan yang bertindak berdasarkan persepsi dan alasan pembelaan mereka terhadap kepentingan umum (*public interest*) atau berdasarkan keyakinan tertentu mengenai kebijakan publik apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar.

5. Nilai-nilai Ideologis

Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan secara logis saling berkaitan, mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia, serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakinkannya.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian. Peneliti memperoleh data primer dari informan-informan baik instansi pemerintahan yaitu BAPPEDA Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, lembaga masyarakat yaitu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

- a. Chepi Hendri Saputra, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.

Tempat Wawancara : Kantor BAPPEDA Kota Bandar Lampung

Waktu : 14-07-2014

Durasi : ± 1,5 Jam

- b. Tony Ferdiansyah, Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Tata Kota di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandar Lampung

Waktu : 16-07-2014

Durasi : ± 2 Jam

- c. Wahyono, Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Badan Pertanahan Provinsi Lampung

Tempat wawancara : Kantor BPN Provinsi Lampung

Waktu : 14-07-2014

Durasi : ±1 Jam

d. Ahmad Wahyudi, Kepala UPT Laboratorium BPPLH Kota Bandar Lampung.

Tempat wawancara : Kantor BPPLH Kota Bandar Lampung

Waktu : 07-07-2014

Durasi : ±1,5 Jam

e. Bedjo Dewangga, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung

Tempat wawancara : Sekretariat Walhi di Jl. Tupai Gg Kancil No.34
Kedaton, Bandar Lampung.

Waktu : 03-07-2014

Durasi : ± 2 jam

f. Candra Muliawan, Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung

Tempat wawancara : Kantor LBH Bandar Lampung

Waktu : 26-08-2014

Durasi : ± 1 jam

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. Data sekunder ini sangat penting bagi peneliti untuk memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun informan yang akan dijadikan sumber informasi atau data dalam penelitian ini adalah:

1. Chepi Hendri Saputra, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung. Badan yang merencanakan pembangunan-pembangunan di segala aspek yang ada di kota Bandar Lampung.
2. Tony Ferdiansyah, Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Dinas Tata Kota Bandar Lampung dijadikan sebagai informan utama dalam penelitian ini karena Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah pihak yang menjadi salah satu aktor utama dalam merumuskan agenda-agenda yang berkaitan dengan penataan kota termasuk ruang terbuka hijau.
3. Wahyono, Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Badan Pertanahan Provinsi Lampung. Badan yang mengurus segala kegiatan pertanahan di provinsi lampung.
4. Ahmad Wahyudi, Kepala UPT Laboratorium BPPLH Kota Bandar Lampung. BPPLH adalah badan pelaksana startegi ataupun kebijakan yang telah dirumuskan oleh dinas tata kota.

5. Bedjo Dewangga, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung.
Walhi adalah LSM yang mengetahui kasus ini secara baik sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Candra Muliawan, Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan menggunakan metode tatap muka, yaitu dengan mendatangi informan yang berada di instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang dianggap memahami tema dari penelitian ini. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Chepi Hendri Saputra, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Bandar Lampung.
2. Tony Ferdiansyah, Kepala Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota Dinas Tata Kota Bandar Lampung.
3. Wahyono, Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu Badan Pertanahan Provinsi Lampung
4. Ahmad Wahyudi Kepala UPT Laboratorium BPPLH Kota Bandar Lampung.

5. Bedjo Dewangga, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung.
6. Candra Muliawan, Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

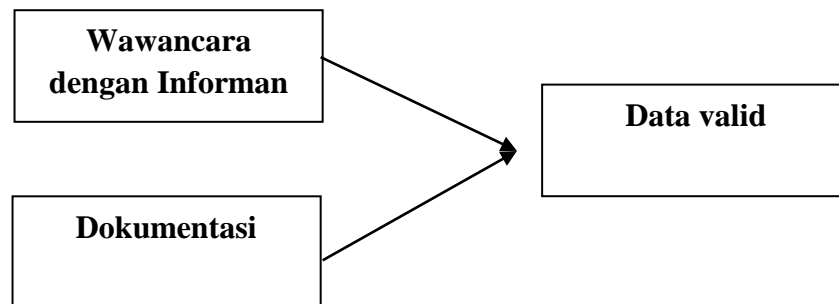
Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data sekunder pendukung data primer dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030;
4. Peta RTRW 2011-2030 berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2030.
5. Keputusan Walikota Bandar Lampung Tentang Penetapan Areal Tanah Sebagai Taman Hutan Kota di Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Kedaton.
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Nama PT. HKKB Atas Tanah di Kota Bandar Lampung.

7. Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Atas Perkara Sengketa Tanah Taman Hutan Kota Way Halim.
8. Dokumen dari Dinas Tata Kota Bandar Lampung berupa hasil riset BPPLH tahun 2011 terkait ruang terbuka hijau di Bandar Lampung.

3. Triangulasi Data

Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggali informasi yang didapat dari para informan dan dari dokumentasi yang diperoleh sehingga data yang didapat benar-benar data yang valid dan benar.



F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh Moleong (2006: 151) meliputi:

1. Editing

Tahap editing, peneliti memperbaiki kalimat-kalimat hasil wawancara yang dianggap tidak baku atau kurang baku dan menggantinya dengan kata atau

kalimat yang lebih baik dan baku. Sehingga semua data hasil wawancara yang ditampilkan (*display*) adalah kalimat-kalimat yang baik dan baku.

Beberapa contoh kalimat yang diedit:

1. “*sebenarnya* kalau masalah lahan dan dana itu memang masalah vital yang masih belum bisa dikendalikan, tapi memang ada satu hal yang harus di perhatikan ialah tidak ada kejelasan siapa yang *ngurusin* RTH itu”. → “*sebenarnya* kalau masalah lahan dan dana itu memang masalah vital yang masih belum bisa dikendalikan, tapi memang ada satu hal yang harus di perhatikan ialah tidak ada kejelasan siapa yang *mengelola* RTH itu”.
2. “*kalo* lahan taman hutan kota yang *sekarang lagi kasus* (PT HKKB) itu di *jadiin* cadangan pengembangan tahun 2010 jaman *pak herman* sekarang, *tp* kan ijinnya keluar pada tahun 2009 ketika masih ada *pak edi*, mereka (PT HKKB) *udah minta* ijin ke pemkot dan diijinkan BPN, sehingga pada tahun 2010 yang harus kita ikuti, dan kita rubah peruntukannya sesuai keputusan BPN tersebut....”. → “Jika lahan taman hutan kota yang sekarang terkena sengketa (PT HKKB) itu di jadikan cadangan pengembangan tahun 2010 jaman Walikota Herman HN saat ini, tapi kan ijinnya keluar pada tahun 2009 ketika walikota sebelumnya menjabat, mereka (PT HKKB) telah meminta ijin ke pemkot dan diijinkan BPN, sehingga pada tahun 2010 yang harus kita ikuti, dan kita rubah peruntukannya sesuai keputusan BPN tersebut....”.

2. Interpretasi Data

Peneliti menggali makna yang terdapat di dalam informasi-informasi hasil wawancara. Selanjutnya peneliti menampilkan hasil interpretasi dari hasil wawancara di bagian bawah kutipan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti mereduksi data-data yang diperoleh yang dianggap kurang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Sehingga yang tersaji dalam penelitian ini adalah informasi-informasi yang sudah direduksi sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka data-data tersebut di tampilkan dalam bab hasil dan pembahasan dimulai dari halaman 52.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang di kemukakan adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan data-data yang telah terkumpul yang telah diolah pada penelitian ini.